

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah di Indonesia diawali pada tahun 1992 dengan diterbitkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang bank dengan sistem bagi hasil. Kemudian di tahun 1992 telah lahir bank syariah pertama sebagai pelopor yang tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 hasil perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Syariah. Pada tahun 1998 ditetapkan dasar hukum yang lebih kuat tentang Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2008, dikeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dimana Undang-Undang tersebut sudah disahkan, dan sudah menyempurnakan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang belum mengacu pada sistem syariah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sudarsono, Heri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm 33.

Menurut jenisnya bank syariah terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah.<sup>2</sup> Berikut ini adalah perkembangan bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia sampai dengan tahun 2015, dapat terlihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Jaringan Kantor Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah ( BUS )**  
**dan Unit Usaha Syariah ( UUS )**

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BUS	3	5	6	11	11	11	11	12	12
UUS	26	27	25	23	24	24	23	22	22

Sumber : OJK.go.id (Data diolah, 2016)

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah jaringan kantor bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan pasca pengesahan Undang-Undang N0.21 Tahun 2008. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya mengimpun dana dari masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, menjadi tidak berfungsi.<sup>3</sup>

Dana adalah uang tunai yang dimiliki oleh bank, atau aktiva yang diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank, melainkan berasal dari dana titipan orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu dapat mengambil uang tersebut,

<sup>2</sup> Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2009, hlm106.

<sup>3</sup> Danupranata, Gita, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 35.

baik semuanya atau secara sedikit demi sedikit. Berdasarkan data empiris yang ada, dana yang dimiliki oleh pemilik bank tersebut ditambah dengan cadangan modal yang berasal dari dana akumulasi keuntungan bank, hanya 7 hingga 8 persen dari total aktiva bank. Bahkan untuk di Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank tidak melebihi dari 4 persen dari total aktiva. Hal tersebut menjadikan bukti bahwa sebagian modal kerja bank berasal dari dana masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari Bank Sentral.<sup>4</sup>

Modal terbesar bank adalah dana masyarakat. Masyarakat akan memilih untuk menabung atau menginvestasikan dananya tergantung pada pendapatan, apabila pendapatan yang dimiliki tinggi maka masyarakat akan menabung namun apabila pendapatannya rendah masyarakat enggan menabung, kondisi ini juga akan mempengaruhi perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK). Selain kondisi tersebut, Kondisi ekonomi makro juga berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah karena akan mempengaruhi individu, kelompok dan perusahaan untuk bertransaksi dengan perbankan syariah, ketika kondisi pendapatan nasional membaik maka meningkatkan pendapatan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah.

Dapat dikatakan bahwa dampak ekonomi makro sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri perbankan syariah nasional. Faktor makro yang pertama adalah inflasi, dimana inflasi merupakan suatu kenaikan harga

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2005, hlm. 267.

yang terjadi secara terus-menerus dari barang dan jasa secara umum bukan hanya satu komoditi saja.<sup>5</sup> Apabila terjadi inflasi maka terjadi ketidakpastian kondisi makro ekonomi suatu negara yang mengakibatkan masyarakat lebih menggunakan dananya untuk konsumsi.

Tingginya harga yang melambung tinggi sampai 100 persen atau lebih dalam setahun (hiperinflasi), dan pendapatan masyarakat yang tetap atau pendapatan yang meningkat namun sesuai dengan besarnya inflasi membuat masyarakat tidak memiliki kelebihan dana untuk disimpan dalam bentuk tabungan atau untuk diinvestasikan. Tingginya inflasi yang terjadi di suatu negara akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan akan menurunkan kekayaan dalam bentuk uang, sehingga masyarakat cenderung akan menyimpan aktiva mereka dalam bentuk lain, seperti emas, dan properti yang bisa bertahan nilainya di masa-masa inflasi.<sup>6</sup>

Faktor kedua ekonomi makro adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Tingginya inflasi yang terjadi di suatu negara juga berdampak pada kesejahteraan dan pendapatan masyarakat yang berdampak pada pendapatan nasional dari beberapa sektor yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran yang terjadi di suatu negara dari berbagai sektor ekonomi. Perubahan pendapatan sektor-sektor Produk Domestik Bruto (PDB) tersebut akan mempengaruhi masyarakat, baik

---

<sup>5</sup> Insukindro, *Pendekatan Kointegrasi Dalam Analisis Ekonomi, Studi Kasus Permintaan Deposito dan Valuta Asing di Indonesia*, 1994, Vol 1. No.2. hlm. 136.

<sup>6</sup> Huda *et al*, Nurul, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Edisi pertama, Catatan ke 2, 2008, hlm. 176.

perseorangan maupun korporasi, sehingga akan mempengaruhi besaran investasi dan tabungan masyarakat pada bank syariah.<sup>7</sup>

Faktor ketiga yang mempengaruhi Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah nilai tukar atau *kurs*. Nilai tukar adalah perbandingan nilai diantara kedua barang. Secara umum, apabila suatu barang ditukar dengan barang lain terdapat perbandingan nilai tukar antara kedua barang. Nilai tukar tersebut adalah harga didalam pertukaran barang tersebut. Demikian pula pertukaran dua mata uang yang berbeda, maka akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut.<sup>8</sup>

Sementara *BI Rate* adalah faktor keempat ekonomi makro yang mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian karena *Bi Rate* mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk meminjam sejumlah dana serta pendapatan yang diperoleh karena meminjam dana tersebut. Menurut Bank Indonesia *BI rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.<sup>9</sup> Tingginya minat nasabah untuk menabung dipengaruhi oleh tingkat bunga, hal ini menunjukkan bahwa pada saat tingkat bunga tinggi, masyarakat lebih tertarik mengorbankan konsumsi sekarang guna menambah tabungannya. Dilihat dari tabel di bawah ini.

---

<sup>7</sup> Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 201.

<sup>8</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Buku II, Yogyakarta: BPFE, 1992, hlm. 163.

<sup>9</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses 21 Desember 2016

**Tabel 1.2**

**Komposisi Dana Pihak Ketiga(DPK), Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), Nilai tukar/ kurs dan BI Rate Periode 2007 – 2015 di Indonesia.**

<b>Tahun</b>	<b>DPK (Milyar)*</b>	<b>Inflasi (Persen)*</b>	<b>PDB (Milyar)*</b>	<b>KURS (rupiah)*</b>	<b>BI Rate (persen)*</b>
<b>2010</b>	76.036.000	6,96	5858121	8991	6,50
<b>2011</b>	115.415.000	3,79	6235198	9068	6,00
<b>2012</b>	147.512.000	4,35	6620964	9685	5,75
<b>2013</b>	183.534.000	8,38	6995263	12189	7,50
<b>2014</b>	217.858.000	8,36	7031046	12442	7,75
<b>2015</b>	231.175.000	3,35	7901023	13658	7,50

Sumber : \*BI.go.id, BPS.go.id, OJK.go.id (Data diolah, 2016)

Dari tabel 1.2 Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK), inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), nilai tukar dan BI Rate di Indonesia dari tahun 2010 – 2015 terjadi secara fluktuasi. Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) selalu meningkat hal ini dikarenakan perkembangan yang positif dari ekonomi makro di Indonesia. Dapat dilihat dari tabel komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2015. Peningkatan ini merupakan dampak langsung dari perkembangan jaringan kantor dan layanan sistem perbankan syariah di Indonesia. Inflasi cenderung menurun dari 6,96 persen di tahun 2010 menjadi 3,35 persen ditahun 2015. Sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung meningkat dari Rp.5858121 menjadi Rp. 7901023 milyar di tahun 2015. Untuk nilai tukar

rupiah atau kurs juga meningkat tiap tahunnya dari Rp 8991 di tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 13658 di tahun 2015. Dan untuk perkembangan BI Rate dari tahun 2010 – 2015 cenderung menurun dari 6,50 persen ditahun 2010 menjadi 7,50 persen ditahun 2015.

Volume tinggi rendahnya dana pihak ketiga dapat dijadikan cara mengukur kualitas suatu bank. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga suatu bank maka mengidentifikasikan bahwa semakin berkualitasnya bank tersebut serta menandakan bahwa masyarakat semakin percaya kepada bank tersebut. Sebaliknya, jika volume dana pihak ketiga menurun maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut memiliki kualitas yang kurang baik sehingga masyarakat kurang percaya terhadap bank tersebut.<sup>10</sup>

Hubungan antara Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), Nilai kurs, dan BI Rate terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah pada dasarnya, bank syariah memiliki perbedaan sistem operasional dengan sistem bank konvensional. Karena bank syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti yang dilakukan bank konvensional. Sehingga, apabila suatu negara sedang mengalami inflasi yang tinggi akan mempengaruhi pendapatan masyarakat dan menyebabkan naiknya konsumsi masyarakat di negara tersebut, sehingga dapat mempengaruhi pola *saving* dan *disaving*.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Tohari (2010) menyatakan bahwa variabel kurs, dan Inflasi, berpengaruh positif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Beberapa faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah

---

<sup>10</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*, Edisi 2, Jakarta : UPP AMP YKP, 2010, hlm. 11.

<sup>11</sup> Sadono, Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 15.

inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), Kurs dan BI rate terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah di Indonesia.

Oleh karena itu penulis mengambil judul dengan mengembangkan penelitian sebelumnya yaitu : **Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Syariah di Indonesia periode 2007 – 2015**. Sebagai sample yang diambil yaitu seluruh bank syariah yang ada di Indonesia.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka beberapa hal yang dapat diidentifikasi terkait penelitian ini adalah :

1. Pada saat suatu negara mengalami kenaikan inflasi maka berimbas pada pendapatan dan konsumsi masyarakat yang akan mempengaruhi Dana Pihak Ketiga.
2. Rupiah setiap tahun mengalami depresiasi terhadap Dollar Amerika.
3. Pendapatan ekonomi mempengaruhi pendapatan yang diterima masyarakat dan konsumsi masyarakat sehingga mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Syariah.



### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh ekonomi makro yang diproksikan dengan Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), Nilai Tukar/Kurs dan BI Rate secara simultan terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2007 – 2015?
2. Bagaimanakah pengaruh ekonomi makro yang diproksikan dengan Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), Nilai Tukar/Kurs dan BI Rate secara parsial terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2007 – 2015?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ekonomi makro yang diproksikan dengan Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), Nilai tukar/kurs dan BI Rateterhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) secara simultan pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2007 -2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh ekonomi makro yang di proksikan dengan inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), Nilai tukar/kurs dan BI Ratesecara parsial terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2007 - 2015.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat dari penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini sebagai proses pembelajaran yang memberi tambahan pengetahuan serta pengalaman kepada peneliti selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perbankan syariah, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pada Bank Syariah.